

BAB I

PENDAHULUAN

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ
نُصِرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya :

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Allah memerintahkan kita untuk mendayagunakan tanah/lahan pertanian, (sesuai dengan penggunaannya) karena di dalam tanah yang baik dengan izin Allah akan tumbuh tanaman dengan subur.

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang No. 26 Tahun 2007 penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam serta sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu instrumen kebijakan untuk pembangunan ekonomi ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan upaya dan strategi pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman terhadap kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya pembangunan ekonomi, kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi untuk tumbuh dan berkembang yang cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Selain itu pembangunan ekonomi harus difokuskan kepada perbandingan

kebutuhan lahan yang tersedia guna terciptanya ketahanan nasional yang lebih baik karena pembangunan ekonomi yang kuat merupakan salah satu faktor penunjang ketahanan nasional yang kuat.

Ketahanan Pangan merupakan salah satu program pemerintah yang harus didukung oleh kebijakan tata ruang. Ketahanan pangan mengandung makna kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan pangan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, untuk menjamin integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Dalam mendukung upaya ketahanan pangan perlu dilakukan analisis guna tercapainya tujuan utama ketahanan pangannya itu sendiri. Ketahanan pangan selalu menjadi permasalahan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan, dan tidak adanya kebijakan dalam penyiapan lahan dan ruangnya, sehingga dapat menjadi suatu bencana pangan bagi keberlangsungan hidup manusia.

Untuk mengantisipasi permasalahan pangan tersebut maka pemerintah mulai menggaungkan isu diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Isu tersebut sebenarnya sudah digaungkan sejak lama, namun tindakan kongkrit mulai dilakukan ketika bencana mulai mengancam. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan *icon* untuk dijadikan contoh ketahanan pangan nasional. Mulanya pada tahun 2007 Sekda Jabar mengusulkan Kampung Cireundeu sebagai salah satu panutan dalam hal diversifikasi pangan kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2008 Dewan Ketahanan Pangan memberikan *warning* ke pemerintah, bahwa ketergantungan terhadap beras secara terus menerus akan mengancam ketahanan nasional. Mengindahkan peringatan tersebut, pemerintah menginstruksikan untuk mempercepat diversifikasi pangan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Semenjak saat itu pemerintah setuju untuk menjadikan Kampung Cireundeu sebagai ikon diversifikasi pangan di Jawa Barat. Pada tahun 2010 Kampung Cireundeu mendapat program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Setahun kemudian Kampung Cireundeu ditetapkan sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan dan semenjak saat itu nama Kampung Cireundeu menjadi tersohor di dalam dan di luar negeri.

Dalam RTRW Kota Cimahi tahun 2010-2030 materi pola ruang mengarahkan bahwa Kelurahan Leuwigajah adalah sebagai perlindungan kawasan hutan lindung. Ini disebabkan oleh terjaganya lingkungan kampung adat yang memegang teguh peraturan adat bahwa memiliki kesamaan dengan kebijakan pemerintah seperti Kepres No. 32 Tahun 1990 yang berbunyi Hutan Lindung, Hutan Bergambut, dan Resapan Air dengan peraturan adat yang berbunyi *Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan dan Leuweung Baladahan* sehingga adanya korelasi bahwa ketahanan ruang Kampung Adat Cireundeu sangat terjaga dan bisa menguatkan Ketahanan Pangan yang ada di Kampung Adat Cireundeu.

Dalam Profil Wilayah Kota Cimahi (Bappeda 2010-2030, hal 9) Kelurahan Leuwigajah adalah kompleks perbukitan yang dikelilingi oleh pegunungan yang terdiri dari :

- a. G. Lagadar
- b. G. Puncaksalam
- c. G. Gajahlangu
- d. G. Masoro
- e. G. Leutik

Dari kelima gunung tersebut merupakan kawasan perbukitan dan dalam kondisi eksiting tersebut tidak cocok untuk ditanami padi.

Dalam RTRW Kota Cimahi, Kelurahan Leuwigajah termasuk Kawasan Pusat Kota Baru (*New Central Bussines District*) di dalam RTRW Kota Cimahi ini dapat disimpulkan bahwa Kampung Adat Cireundeu terletak di kota, tetapi masih menjunjung tinggi nilai-nilai pedesaan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti menemukan ketertarikan bahwa Kampung Adat Cireundeu masih dalam administrasi Kota Cimahi, tetapi nuansa desa sangat terasa di kampung tersebut (Bappeda, 2010-2030).



Gambar 1.1 Nuansa asri Kampung Adat Cireundeu
Sumber : hasil survey 2014

Dalam Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Cimahi, Kelurahan Leuwigajah adalah kawasan strategis peruntukan wisata alam dan wisata buatan yang di antaranya adalah Kampung Adat Cireunde. Akan tetapi pada kebijakan dan strategi Penataan ruang Kota Cimahi. Peningkatan pelayanan persampahan Kota Cimahi berbunyi Pengamanan TPAS Leuwigajah melalui upaya mewujudkan kawasan hijau atau *Buffer Zone* di area TPA Leuwigajah ini adalah salah satu faktor yang melemahkan Kampung Adat Cireunde karena lokasi dan jarak TPAS berada di RW 10 Kampung Adat Cireunde kurang lebih 50 meter dari kampung adat menjadi desa wisata ketahanan pangan yang mandiri berbasis komoditi singkong (RTRW Kota Cimahi Tahun 2010-2030).

Dalam RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032 Pengembangan wilayah Kota Cimahi diwujudkan ke dalam 5 (lima) Sub Wilayah Kota (SWK), yaitu: SWK A, SWK B, SWK C, SWK D dan SWK E. Peningkatan fungsi Kota Cimahi dalam pengembangan Cekungan Bandung Raya sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif dan penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan sarana dan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota.

Salah satu kebijakan pengembangan struktur ruang, termuat pengembangan mengenai kawasan strategis kota. Salah satu pengembangan kawasan strategis kota terdapat di wilayah BWK/SWK E dengan konsentrasi seperti di bawah ini:

- 1) Mengendalikan perkembangan perumahan;
- 2) Menata kawasan pariwisata berbasis lingkungan;
- 3) Menata kawasan militer menjadi kawasan heritage kota; dan
- 4) Mengembangkan RTH.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota, dilaksanakan melalui penetapan kawasan strategis lingkungan di kawasan yang termasuk KBU, daerah rawan bencana alam dan RTH, kawasan strategis sosial budaya di Kampung Cireunde Kelurahan Leuwigajah, serta kawasan strategis ekonomi di sepanjang koridor Jalan Nasional, Alun-alun dan Baros.

Salah satu strategi yang dimuat dalam kebijakan untuk mendorong kawasan strategis kota adalah melalui penataan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kota kepentingan sosial budaya untuk mempertahankan nilai

sejarah kawasan dan pelestarian bangunan bersejarah serta pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan.

Selain kawasan strategis kota, kebijakan RTRW Kota Cimahi juga memuat kawasan cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) lokasi. Salah satu lokasi yang dimaksud adalah Kampung Cireundeu, untuk memelihara kawasan cagar budaya, maka ditetapkan 2 (dua) arahan sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan menjaga kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya melalui kegiatan pelestarian bangunan dan lingkungan; dan
2. Pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar bangunan dan kawasan cagar budaya.

Dalam rencana kawasan pariwisata, ditetapkan kawasan Desa Wisata Ketahanan Pangan (DEWITAPA) di Kampung Cireundeu.

Dalam RDTR, Kota Cimahi dibagi 5 SWK (sub wilayah kota) dengan tujuan mengefisienkan pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi. Kelurahan Leuwigajah khususnya Kampung Adat Cireundeu termasuk ke dalam RDTR SWK E yang meliputi Kelurahan Cibeber, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Baros dan Kelurahan Leuwigajah. Dalam pengembangan kawasan strategis Kelurahan Leuwigajah termasuk Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Kampung Cireundeu sebagai wisata budaya lokal di Kelurahan Leuwigajah. Sementara Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibeber termasuk ke dalam Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan sebagai kawasan lindung Kota Cimahi bagian selatan.

Dalam rencana sistem permukiman RDTR BWK/SWK E terdapat 6 lokasi Sub SWK. Salah satu lokasi tersebut adalah SWK Leuwigajah dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan kepadatan sedang, pengembangan RTH dan perdagangan skala lokal.

Dalam sistem pusat pelayanan SWK Leuwigajah terbagi 2 (dua) utara dan selatan, blok Leuwigajah utara sebagai sub pusat pelayanan kawasan perkotaan yang diarahkan sebagai pemanfaatan lahan yang merupakan kegiatan transisi dan mempunyai intensitas sedang sampai tinggi dan kegiatan bersifat campuran. Sedangkan blok Leuwigajah Selatan diarahkan sebagai pusat pelayanan lingkungan sebagai pemanfaatan lahan yang merupakan kegiatan yang melengkapi fungsi pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan dengan intensitas

rendah sampai sedang, yaitu kegiatan perumahan, rekreasi dan skala pelayanan kegiatan lokal atau lingkungan.

Berdasarkan arahan RTRW Kota Cimahi 2012-2032 Kampung Cireundeu ditetapkan sebagai kawasan strategis sosial budaya dan cagar budaya, oleh karena itu Kampung Cireundeu perlu adanya penataan baik dari segi bangunan maupun lingkungannya. Hal ini akan memberikan nilai tambah dan tentunya akan menambah nilai jual Kampung Cireundeu terhadap kepariwisataan Kota Cimahi.

Selain itu, perlu adanya penataan infrastruktur pendukung untuk mewujudkan Kampung Cireundeu sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan (Dewitapa). Tentunya infrastruktur pendukung ini memperhatikan nilai-nilai sejarah dan norma yang berlaku di Kampung Cireundeu.

Dalam penelitian ini akan dikaji beberapa faktor yang selama ini ditemukan di Kampung Adat Cireundeu, yang dapat menguatkan dan melemahkan (hasil wawancara) ketahanan pangan dan ketahanan budaya, namun perlu dikaji lebih mendalam adalah sebagai berikut:

a. Faktor Yang Menguatkan Kampung Adat Cireundeu

- 1) Adanya tradisi nenek moyang yang harus mereka jaga dan jadi panutan mereka untuk dijalani kepada keturunan-keturunannya.
- 2) Tradisi makan singkong harus dijalani walaupun sekarang produksi beras sudah tersedia dan terjangkau.
- 3) Mengajarkan kepada anak dari bayi untuk memakan singkong dengan cara bubur singkong sampai bisa memakan beras singkong.
- 4) Adanya penyuluhan atau bantuan-bantuan yang diterima kampung adat cireundeu seperti alat-alat untuk mengolah singkong agar lebih bervariasi untuk membuat singkong menjadi kue dan makanan-makanan yang lebih modern yang terbuat dari singkong sehingga menimbulkan efek positif bagi masyarakat kampung adat dalam mengelola ketahanan pangan yang sekarang sudah menjadi suatu icon Kota Cimahi.
- 5) Ada tatanan nilai-nilai budaya sunda yang membuat patuh terhadap tradisi leluhur seperti :
 - a) Puasa seumur hidup memakan nasi yang terbuat dari beras karena beras terbuat dari padi yang menurut

ajaran kampung adat tersebut beras adalah tolak bala dan beras itu suci dan tidak bisa untuk dimakan. Mereka biasanya menyimpan padi di depan pintu.

- b) Jendela rumah harus menghadap ke terbitnya matahari.
- c) Kampung adat Cireundeu menganut "*ngindung kawaktu mibapa ka jaman*" yang artinya adalah membolehkan masyarakat Cireundeu melakukan modernisasi atau dengan kata lain mengikuti zaman asal tidak lupa terhadap budaya leluhur memakan singkong.

b. Faktor Yang Melemahkan Kampung Adat Cireundeu

- 1) Dari hasil wawancara dengan warga kampung adat, Pemerintah Jawa Barat akan mengaktifkan kembali TPA Leuwigajah akan tetapi oleh Pemkot Cimahi sudah dilarang ada TPA karena adanya suatu potensi icon Kota Cimahi yang menjadi tempat pariwisata budaya atau rekreasi budaya yang sudah ditetapkan menjadi desa mandiri pangan. Apabila TPA itu direalisasikan oleh Pemerintah Jabar dan disetujui oleh Pemkot Cimahi keadaan kampung adat Cireundeu akan tidak asri lagi seperti sekarang dan pengunjung akan semakin berkurang dan melemahkan potensi yang ada di kampung adat Cireundeu.
- 2) Ketidaksesuaian dari nilai-nilai leluhur menjadi faktor yang melemahkan kampung adat seperti :
 - a) Tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhur seperti tidak mematuhi hukum-hukum adat seperti Syahadat, Sah adat dan Sa adat yang artinya jika masyarakat kampung adat memiliki pasangan hidup harus mematuhi ketiga kriteria tersebut yang artinya syahadat = keyakinan yang bermakna memiliki jodoh harus dengan satu keyakinan (sunda wiwitan), Sah adat = sah menurut adat yang bermakna di setujui oleh kedua orang tua dan disetujui juga oleh adat, sa adat = seadat atau satu adat yaitu adat sunda. Pada kenyataan ada beberapa masyarakat kampung adat yang menikah dengan masyarakat non adat dan beda keyakinan, sehingga memiliki keturunan yang

memakan nasi apabila hal ini terus terjadi maka ketahanan pangan kampung adat Cireundeu akan punah.

Namun dengan demikian, ketahanan pangan harus dibarengi dengan ketahanan lainnya agar tetap berlangsung sesuai dengan yang direncanakan, di antaranya ketahanan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola, sumber daya kebijakan sebagai aturan dan panutan dan sumber daya ruangnya sebagai media yang sudah tersedia dan dari alam.

Seluruh media, dari media cetak hingga elektronik berlomba-lomba untuk mempublikasikannya. Tidak heran jika banyak masyarakat umum yang menjadi tahu dan berdatangan ke Kampung Cireundeu. Kampung Cireundeu banyak dikunjungi tidak hanya oleh masyarakat di Jawa Barat bahkan dari seluruh Indonesia dan beberapa negara yang melakukan studi banding di bidang ketahanan pangan, di samping juga menjadi pusat penelitian bagi kalangan perguruan tinggi baik dari aspek konsumsi pangan maupun dari aspek kearifan lokal yang ada di Kampung Cireundeu (Diskopindagtan Cimahi, 2011).

Mengarah hanya perhatian masyarakat umum bahkan Pemerintah ke Kampung Cireundeu tidak luput dari kebiasaan dan adat istiadat unik yang berkembang secara turun temurun di Kampung Cireundeu. Hal ini adalah, bahwa Kampung Cireundeu mengalami penguatan yang didukung oleh pemkot dan adanya para wisartawan budaya yang datang ke kampung tersebut. Masyarakat Kampung Cireundeu memiliki prinsip hidup yang masih dipegang teguh terus menerus dari dulu hingga kini. Menurut Seksi Pariwisata dan Budaya, masyarakat adat kampung Cireundeu berpedoman pada prinsip hidup yang mereka anut, yaitu :

“Teu Nyawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat.”

Yang maksudnya adalah tidak punya sawah asal punya beras, tidak punya beras asal bisa menanak nasi, tidak punya nasi asal makan, tidak makan asal kuat. Dengan maksud lain agar manusia tidak bergantung pada satu hal saja, misalnya beras sebagai bahan pokok utama di Indonesia namun hal itu tidak dijadikan ketergantungan. Warga Cireundeu memiliki alternatif makanan pokok lain yaitu ubi kayu atau yang biasa juga disebut singkong. Kondisi inilah yang membuat pemerintah menunjuk Kampung Cireundeu sebagai salah satu desa percontohan dalam konteks wilayah mandiri pangan.

Sikap keterbukaan, sopan dan selalu menghormati satu sama lain, membuat pengunjung yang datang merasa nyaman berada disana. Terlebih lagi dengan nuansa budaya sunda yang kental dan keadaan lingkungan yang asri dan terjaga, membuat siapa saja tertarik dan senang berkunjung ke Kampung Cireundeu. Ketenaran tersebut membuat Kampung Cireundeu memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak dan dengan masuknya pengaruh dari pihak luar ke dalam kehidupan bermasyarakat Kampung Cireundeu, tentunya akan memberikan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Cireundeu.

Namun terlalu cepat dan banyaknya pengaruh dari luar yang masuk tersebut dapat menyebabkan suatu masalah tersendiri, terutama masalah perubahan sosial. Konsekuensi yang diberikan akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menerimanya pun tidak sederhana. Seperti yang terjadi di Dusun Melangi Nogotirto Gamping, Sleman. Pengaruh luar rupanya sudah menggerus tatanan sosial dan perilaku masyarakatnya setempat yang sudah tidak lagi menjunjung tinggi dan menghormati tatanan kehidupan tradisonal. Hal serupa pun terjadi di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Banyaknya pengaruh luar yang masuk telah mengubah adat dan kebiasaan dalam melangsungkan pernikahan masyarakat setempat.

Dampak dari masuknya pengaruh luar tadi menjadi suatu aspek yang melemahkan kekuatan Kampung Adat Cireundeu karena akan adanya suatu ketidakselarasan hukum adat dengan adanya pengaruh tersebut yang mungkin akan terjadi suatu kepunahan adat istiadat kampung adat Cireundeu dan budaya sunda yang ada di Jawa Barat, dari sejauh mana kesiapan masyarakat tersebut dalam menerimanya. Kesiapan pun menjadi sangat penting guna membendung atau meminimalisir masalah-masalah sosial yang akan terjadi nantinya. Begitu pula dengan Kampung Cireundeu, banyaknya pengaruh luar yang masuk, mengalir begitu cepat seakan mampu membubungkan nama Kampung Cireundeu dalam waktu sekejap. Fenomena ini dimulai sejak 7 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2007. Fenomena inipun tentunya akan memberikan dampak ke arah ekonomi maupun sosial masyarakat Kampung Cireundeu itu sendiri. Dampak itupun dapat berupa dampak positif atau bahkan dampak yang merugikan. Hal inilah yang kemudian menarik diteliti untuk melihat sejauh mana aspek yang menguatkan dan aspek yang melemahkan atau Ketahanan dan Kerentanan kampung adat Cireundeu dilihat dari analisis dampak yang terjadi di

Kampung Cireundeu dari segi tataran taraf kehidupan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat dan pola diversifikasi pangan masyarakat setempat terhitung sejak tahun 2007 hingga saat ini.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul tugas akhir ini “Kajian Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Budaya Lokal”, terkait dengan ketahanan pangan tersebut maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Bagaimana masyarakat Kampung Adat Cireundeu dapat Hidup berkelanjutan dengan mempertahankan ketahanan pangannya?
2. Bagaimana kebijakan tata ruang terkait dengan perencanaan pembangun kawasan Kampung Adat Cireundeu?
3. Faktor apa saja yang menguatkan dan melemahkan kampung adat tersebut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan masyarakat adat Cireundeu dalam menerima pengaruh luar melalui analisis dampak perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tahun 2007 hingga tahun 2014. Secara lebih khusus tujuan penelitian ini difokuskan ke berbagai aspek kajian tata ruang saja, antara lain :

- 1) Mengamati kebiasaan masyarakat terkait keruangan pembangunan kawasan kampung adat.
- 2) Mengamati dan mengkaji perubahan pola diversifikasi pangan yang terjadi di Kampung Cireundeu dari segi pola konsumsi dan pola produksinya.
- 3) Menganalisis faktor-faktor yang bisa menguatkan dan melemahkan terkait ketahanan pangan Kampung adat Cireundeu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- 1) Akademisi, sebagai bahan tambahan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai besarnya dampak yang ditimbulkan akibat

adanya pengaruh luar yang masuk terhadap kondisi sosial Masyarakat Cireundeu.

- 2) Pemerintah Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, sebagai sumber informasi dan semoga dari penelitian ini, Pemerintah setempat tergerak untuk lebih mengembangkan Kampung Cireundeu baik dari segi olahan singkongnya maupun fasilitas-fasilitas penunjang lainnya jika memang berdampak positif dan mulai mengatasinya jika ternyata berdampak negatif.
- 3) Pemerintah Pusat khususnya Departemen Pertanian, semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi dalam upaya pemerintah untuk terus membangun desa demi kemajuan bangsa.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah sebuah kampung yang memiliki keunikan dalam pola kehidupannya dan telah ditetapkan sebagai kampung adat oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai salah satu kampung adat yang sejajar dengan Kampung Naga (Tasikmalaya), Kasepuhan Cipta Gelar (Banten, Kidul, Sukabumi). Kampung ini sebagai komunitas yang telah berhasil membawa perubahan di komunitasnya dengan melibatkan proses pembelajaran sosial yang dapat dipelajari sebagai salah satu modal pembangunan dalam pembangunan kawasan. Perubahan yang terjadi tidak terlepas dari pembelajaran sosial yang kemudian mengarahkan kepada tindakan kolektif yang dilakukan warga dalam sistem pola permukiman yang dikaitkan berdasarkan artefak-artefak yang ada.

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah RW.10 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan yang mewujudkan model pembelajaran di komunitasnya melalui tindakan kolektif dengan melibatkan proses pembelajaran sosial. Wilayah penelitian ini terletak pada bagian selatan Kota Cimahi yang dikenal dengan sebutan Kampung Cireundeu. Cireundeu berasal dari nama "pohon reundeu", karena sebelumnya di kampung ini banyak sekali populasi pohon rendeu. Pohon reundeu itu sendiri ialah pohon untuk bahan obat herbal. Maka dari itu kampung ini disebut Kampung Cireundeu. Kampung ini merupakan suatu komunitas yang mentradisikan singkong sebagai makanan pokoknya yang dikenal dengan istilah "Rasi" (beras singkong) yang terdiri dari

350 kepala keluarga atau 1750 jiwa, yang sebagian besar masyarakatnya bertani ketela.

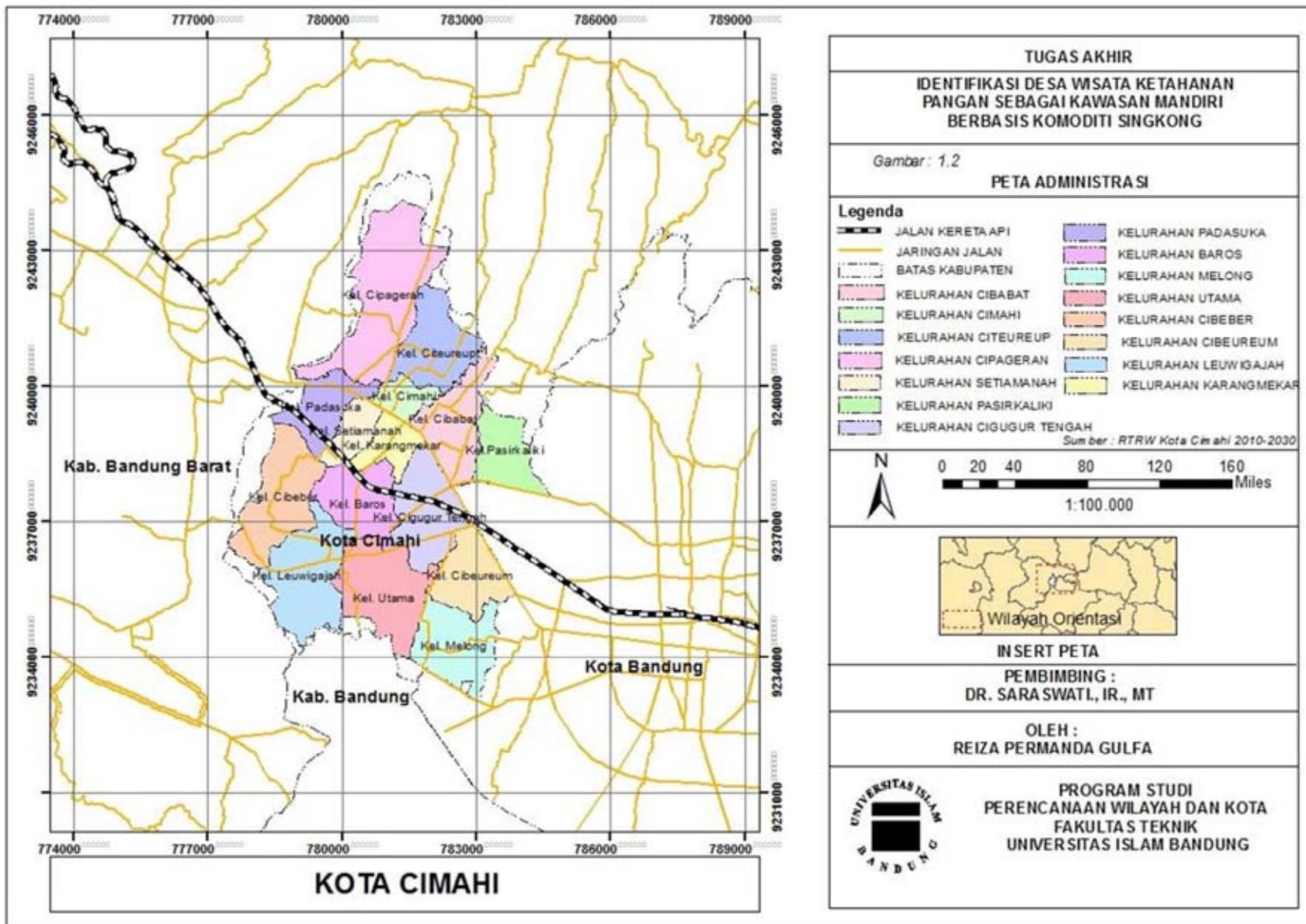
Secara geografis, Kampung Adat Cireundeu terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajah Langu, namun secara administratif Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar. 1.2 Peta Admiistrasi Kelurahan Leuwigajah** dan **Gambar 1.3 Tempat Pengolahan dan Hasil Komoditi dari Singkong.**

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Pada penelitian ini, ruang lingkup materi yang dibahas adalah sebagai berikut :

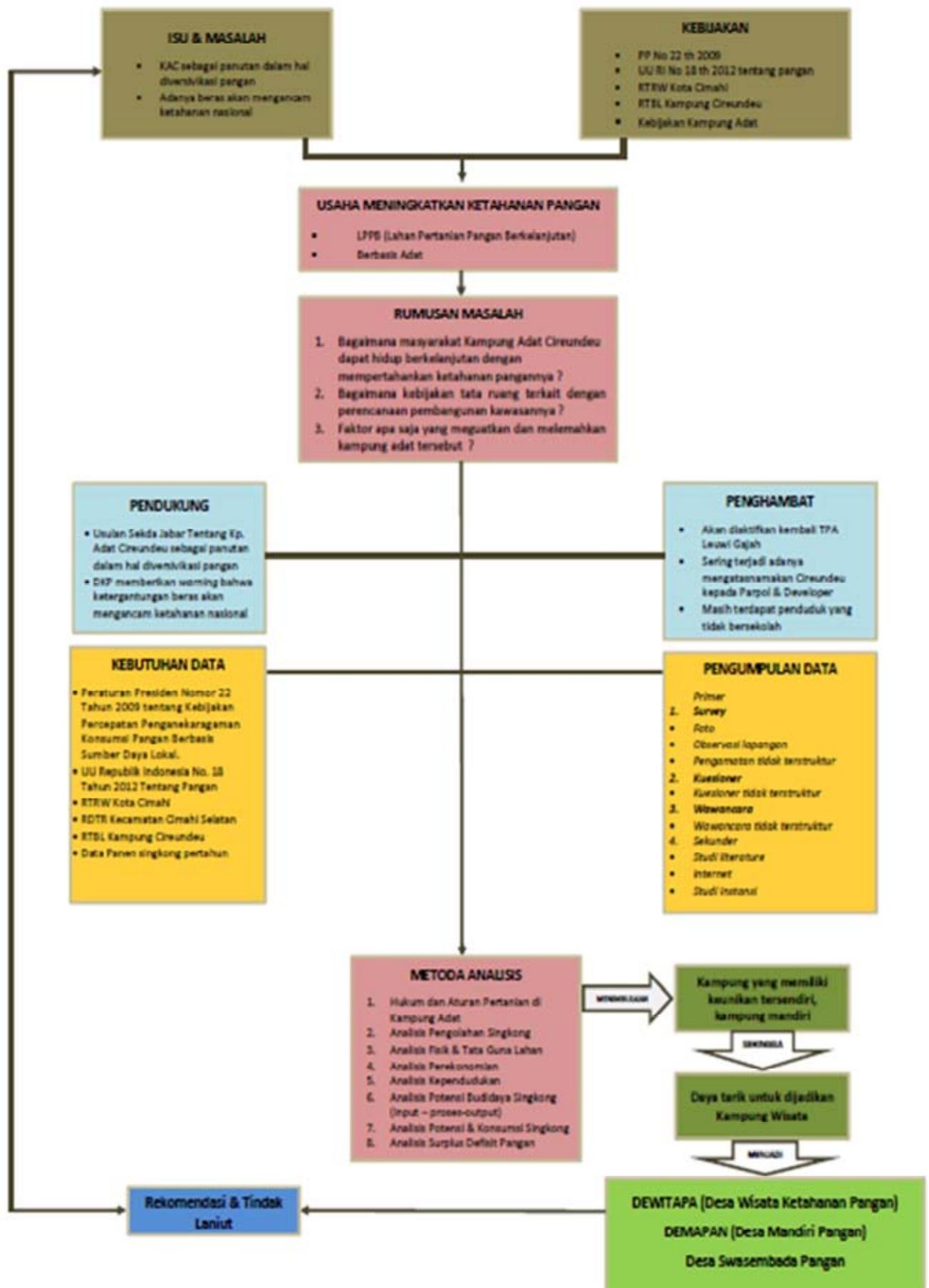
1. Pengumpulan data-data terkait, di antaranya :
 - a. Lokasi permukiman kampung adat
 - b. Pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana
 - d. Lembaga adat yang berkaitan dengan Peran ketua adat dalam kepemimpinan kawasan (masyarakat adat Cireundeu)
 - e. Dampak yang terjadi dari adanya pola pembelajaran sosial terhadap pembangunan dilihat dari segi fisik, sosial, dan ekonomi.
2. Meneliti pola belajar makan singkong di Kampung Adat Cireundeu dan yang mendukung perubahan lingkungan yang dijelaskan berdasarkan :
 - a. Aktor yang terlibat dalam proses pembelajaran
 - b. Aktor yang berpengaruh dalam proses pembelajaran
 - c. Masyarakat yang terlibat dalam prooses pembelajaran
 - 1) Masyarakat usia dini
 - 2) Masyarakat lansia
 - 3) Pemuda
 - d. Urutan kegiatan pembelajaran serta *outcome* pembelajaran.
3. Mengkaji secara teoritis hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. Standar desa wisata
 - b. Teori umum ketahanan pangan
 - c. Kearifan lokal
 - d. Kebudayaan sunda
4. Kajian mengenai ketahanan pangan di Kampung Adat Cireundeu, Kebijakan Tata Ruang daerah.





Gambar 1.3 Tempat Pengolahan dan Hasil Komoditi dari Singkong
Sumber : hasil survey primer 2013

1.5. Kerangka Berpikir



1.6. Sistematika Pembahasan

Tahapan-tahapan dalam penulisan laporan mengenai eksplorasi pola pembelajaran masyarakat kampung adat Cireundeu terhadap pembangunan kawasan akan disajikan pada sistematika pembahasan berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang studi, Identifikasi masalah, batasan masalah (yang mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi), rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil, dan sistematika pembahasan.

BAB II DEFINISI OPERASIONAL

Pada bab ini akan menguraikan mengenai studi-studi yang pernah ada atau yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pembelajaran sosial dan Cireundeu, beberapa landasan teori yang digunakan sebagai pengarah bagi pemilihan metodologi kajian dan penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan.

BAB III METODOLOGI

Bab ini berisikan mengenai metodologi-metodologi apa saja yang akan digunakan sebagai tahapan-tahapan yang terstruktur dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB IV PEMBAHASAN KETAHANAN PANGAN DAN PENATAAN RUANG KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Bab ini berisikan mengenai data variabel-variabel, Gambaran Umum Kampung Adat Cireundeu dan Model-model ketahanan pangan.

BAB V KAJIAN ANALISIS KETAHANAN PANGAN KAMPUNG ADAT CIREUNDEU BERBASIS KOMODITI SINGKONG

Bab ini berisi identifikasi, analisis, pola pertanian berdasarkan hasil dari data variabel-variabel kemudian dianalisis secara *content analysis*

BAB VI KESIMPULAN, KELEMAHAN STUDI DAN REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan secara keseluruhan selama proses penelitian ilmiah, kelemahan dari penelitian ilmiah ini sehingga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut penelitian dalam pengembangan kawasan ketahanan pangan Kampung Adat Cireundeu.

